

ABSTRAK

Nama : Dina Aisyah Alfarijah
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **KONSTITUSIONALITAS KEBEBASAN BERSERIKAT
ORGANISASI NOTARIS DI INDONESIA**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terkhusus Pasal 82 perihal Organisasi Notaris, para pemohon memohonkan pengujian *a quo* karena ketentuan tersebut telah membatasi kebebasan berserikat bagi Notaris untuk membentuk organisasi-organisasi profesi Notaris. Pembatasan tersebut dinilai telah melanggar hak asasi para Notaris, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana jaminan konstitusional dimaksud ditegaskan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin diperkuat setelah melewati *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan dipertegas kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diakui keberadaannya, tetapi tidak juga bahwa amar putusannya yang membubarkan organisasi selain Ikatan Notaris Indonesia, demikian keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi tunggal notaris yang diatur dalam UUJN tidak bertentangan dengan UUD 1945. Alih-alih terkesan sebagai upaya pengesampingan nilai HAM, kebebasan dalam organisasi notaris hanyalah berlandaskan pada kebebasan etis yang mengacu pada baik atau buruknya suatu tindakan yang diukur pada sejauh mana tindakan itu memberikan perlindungan pada kebebasan dan perluasan kapabilitas, yang dalam hal ini adalah kapabilitas dalam menjalankan keprofesiannya sebagai Notaris dan Wadah Tunggal merupakan keharusan.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, Kebebasan Berserikat, Organisasi Tunggal

ABSTRACT

Name : Dina Aisyah Alfarijah
Study Program: Magister Kenotariatan
Judul : **CONSTITUTIONALITY OF FREEDOM OF ASSOCIATION
NOTARY ORGANIZATIONS IN INDONESIA**

The background of this research is the review of the law to the Constitutional Court, namely the review of the Law on Notary Office (UUJN) specifically Article 82 concerning Notary Organizations, the applicants request an a quo review because this provision has limited freedom of association for Notaries to form notary professional organizations. This restriction is considered to have violated the basic rights of notaries, especially the right to associate, assemble, and express opinions as the constitutional guarantee referred to is emphasized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), the existence of the Indonesian Notary Association as the only notary professional organization was further strengthened after passing a Judicial Review at the Constitutional Court. Judges of the Constitutional Court in the decision of the Constitutional Court Number 009-014/PUU-III/2005 and reaffirmed the decision of the Constitutional Court Number 63/PUU-XII/2014 that the Constitutional Court's decision said that the organization of the Indonesian Notary Association was recognized, but not also that the ruling disbanded organizations other than the Indonesian Notary Association, thus the existence of INI as the only notary organization regulated in UUJN does not conflict with the 1945 Constitution. Instead it is impressed as an effort to set aside values HAM, freedom in a notary organization is only based on ethical freedom which refers to the goodness or badness of an action which is measured by the extent to which the action provides protection for freedom and expansion of capabilities, which in this case is the capability to carry out one's profession as a Notary and Single Institution is a must.

Keywords: Constitutionality, Freedom of Association, Single Bar System